

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan globalisasi tentu saja dapat dirasakan oleh semua sektor kehidupan, tidak terkecuali dibidang perekonomian. Perkembangan perekonomian dapat dirasakan oleh berbagai negara di dunia termasuk negara Indonesia, hal itu bisa dibuktikan dari banyak berdirinya perusahaan-perusahaan diberbagai macam sektor jenis usaha di Indonesia maupun negara lainnya. Dengan banyaknya perusahaan yang berdiri di suatu negara, diprediksi dapat menguntungkan perekonomian dari negara tersebut, misalnya semakin banyaknya perusahaan yang berdiri, maka semakin terbukanya lapangan pekerjaan.

Berikut tabel 1.1 merupakan data perusahaan diberbagai macam sektor jenis usaha yang ada di Indonesia.

**Tabel 1.1**

**Data Perusahaan di Indonesia pada tahun 2012-2014**

NO	Subsektor Perusahaan	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Makanan	5662	5795	5793
2	Minuman	345	367	344
3	Pengolahan Tembakau	945	866	860
4	Tekstil	2246	2287	2304
5	Pakaian Jadi	2248	2075	2034
6	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	684	671	701
7	Kayu, Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Anyaman dari Bambu, Rotan dsj	1112	1067	1066
8	Kertas dan Barang dari Kertas	463	477	485
9	Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	529	533	510
10	Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	70	72	71
11	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	911	978	976
12	Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	246	236	250
13	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1603	1729	1750
14	Barang Galian Bukan Logam	1624	1581	1584
15	Logam Dasar	274	306	318
16	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	938	958	969
17	Komputer, Barang Elektronik dan Optik	308	351	347

Rizal Fadillah, 2017

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI MANAJEMEN PAJAK**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

18	Peralatan Listrik	306	333	334
19	Mesin dan Perlengkapan ytdl	341	364	364
20	Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	307	366	368
21	Alat Angkutan Lainnya	277	315	322
22	Furnitur	1419	1284	1290
23	Pengolahan Lainnya	649	602	615
24	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	85	85	89
25	Bukan Kelompok Industri Manufaktur lagi di KBLI	-	-	-
<b>Jumlah</b>		23592	23698	23744

sumber : [bps.go.id](https://bps.go.id) (2017, data diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah data perusahaan yang berdiri di berbagai macam sektor di Indonesia mengalami peningkatan jumlah perusahaan. Hal ini dapat memastikan perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan.

Semakin banyak berdirinya perusahaan di berbagai macam sektor usaha, dapat mengakibatkan terjadinya kegiatan ekspor dan impor yang dapat menguntungkan bagi perekonomian negara, ekspor dapat meningkatkan devisa negara sedangkan impor dapat memenuhi kebutuhan yang tidak ada di dalam negeri. Manfaat lain dari keberadaan suatu perusahaan tentu saja dari bidang perpajakan, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh atau menerima penghasilan maka akan mengubah status perusahaan tersebut menjadi wajib pajak, sehingga status wajib pajak tersebut akan dikenai pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 1 tersebut perusahaan akan dikenakan pajak penghasilan dalam tahun pajak. Oleh sebab itu, negara dapat memperoleh penghasilan dari pajak atas keberadaan perusahaan. Namun penghasilan negara yang diperoleh dari sektor pajak perusahaan tidak mudah didapatkan, karena dengan adanya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat dikatakan menjadi beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pranoto dan Widagdo (2015) menyatakan bahwa perusahaan harus meminimalkan biaya guna memperoleh laba yang tinggi, di sisi lain perusahaan mempunyai kewajiban melaksanakan semua peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Maka untuk mencapai dua kepentingan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak.

Menurut ketua umum Asosiasi Administrasi Fiskal dan Pajak Indonesia, Gunadi sebagai mana dilansir pada [finance.detik.com](http://finance.detik.com) (11 Januari 2014), mengungkapkan investasi lebih banyak bergerak ke negara Singapura karena tarif pajak penghasilan di Singapura jauh lebih rendah dari Thailand yang sebesar 23%, Malaysia dan Indonesia sama-sama 25%. Sedangkan penetapan pajak tertinggi ada di Filipina dengan 30%. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa banyak perusahaan yang mengalihkan keuntungannya kepada negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah.

Selain itu, masalah perpajakan yang terjadi tidak lepas dari perencanaan pajak, seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang terkemuka di dunia yaitu Google. Menurut Darussalam selaku pengamat pajak yang dilansir [bisnis.liputan6.com](http://bisnis.liputan6.com) (14 Oktober 2016), menuturkan bahwa data menunjukkan pada 2011, Google di Amerika Serikat mencatatkan penghasilan US \$38 miliar dengan keuntungan US \$10 miliar. Di negara Amerika Serikat, seharusnya Google

dipungut tarif pajak 35%. Akan tetapi dengan skema tax planning, perusahaan tersebut cukup membayar 2,2% sehingga Google hemat 32,8%.

Masalah perpajakan pun tidak hanya dilakukan oleh perusahaan multi nasional seperti Google, perusahaan milik negara atau biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menghadapi masalah perpajakan. Menurut Selkiansyah selaku Kasudin DPP Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang dilansir oleh [bisniskeuangan.kompas.com](http://bisniskeuangan.kompas.com) (23 November 2015), mengatakan bahwa perusahaan BUMN menunggak pajak hingga 11 miliar rupiah. Perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa perkapalan yang bertempat di Pelabuhan tanjung Priok.

Sementara itu, menurut Wahyu Tumakaka selaku Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak yang dilansir oleh [nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id) (09 Desember 2014), mengatakan bahwa potensi penerimaan pajak dari BUMN sangat besar, begitu pula target penerimaan pajak dari tahun 2010-2013 sangat tinggi namun realisasi penerimaan pajaknya semakin turun. Hardianti (2013) menyatakan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan BUMN terbukti digunakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan semakin tinggi pula kecenderungan tindakan penghindaran pajak. Menurut Dharma & Ardiana (2016), kepemilikan saham mayoritas BUMN adalah pemerintah, maka dapat dikatakan perusahaan yang berkoneksi politik khususnya adanya kepemilikan langsung oleh pemerintah melakukan tindakan penghindaran pajak.

Menurut pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Ibnu wijaya sebagaimana dilansir pada [pajak.go.id](http://pajak.go.id) (12 Agustus 2014), penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya perusahaan dapat melakukan manajemen pajak, agar dapat menekan biaya pajaknya tapi tidak melakukan pelanggaran perpajakan dan untuk mencapai tujuan perusahaan agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Suandy (2011, hlm. 6) menjelaskan manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Sedangkan menurut Pohan (2016 hlm. 7), perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum.

Salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak untuk menekan serendah mungkin biaya pajaknya adalah memanfaatkan ukuran perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003) di Malaysia dan Richardson dan Lanis (2007) di Australia menemukan bahwa perusahaan skala besar lebih sedikit membayar pajak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015) pada perusahaan LQ45 di Indonesia menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan beberapa penelitian yang masih terdapat perbedaan hasil dan data yang terus mengalami pembaruan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.

Selain ukuran perusahaan, terdapat faktor lain yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak yaitu *Leverage* dalam struktur modal perusahaan. Penelitian yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007) di Australia menemukan bahwa semakin tinggi utang perusahaan dalam struktur modal dapat menyebabkan semakin rendahnya beban pajak yang dibayarkan. Hal itu disebabkan karena bunga yang harus dikeluarkan perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) di Indonesia, menemukan bahwa peran *Leverage* perusahaan dalam meningkatkan kualitas manajemen pajak belum dapat berfungsi secara semestinya. Berdasarkan masih inkonsistensinya hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaharuan, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

Faktor lain yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak adalah intensitas persediaan. Hal ini disebabkan karena dalam

intensitas persediaan dapat mengurangi laba perusahaan karena timbulnya biaya tambahan dari persediaan tersebut. Berdasarkan penjelasan dari PSAK No 14, di dalam persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan, maka biaya yang ditimbulkan dari persediaan secara tidak langsung dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat diturunkan. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Richardson dan Lanis (2007) di Australia, yang menunjukkan bahwa semakin besar intensitas persediaannya maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan. Namun, intensitas persediaan tidak bisa dilakukan oleh semua perusahaan, karena intensitas persediaan tidak ada di perusahaan sektor jasa.

Penelitian lain menemukan bahwa insentitas kepemilikan aset tetap dapat menjadi faktor untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Soepriyanto (2011) di Indonesia, menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap yang lebih tinggi akan memiliki kecenderungan untuk tingkat beban pajaknya yang rendah. Hal ini disebabkan karena adanya depresiasi atau penyusutan dari aset tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan biaya pajaknya. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) menemukan bahwa semakin besar intensitas aset tetap perusahaan maka akan semakin buruk manajemen pajaknya. Penyusutan menurut PSAK no 16 adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Berdasarkan perbedaan dari hasil penelitian tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai permasalahan tersebut.

Penelitian Derashid dan Zhang (2003) dan Noor et al., (2010) tersebut menemukan hasil profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin rendah tarif pajak yang dihadapi oleh perusahaan. Adhikari et al.,(2006) berpendapat bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat menanggung beban pajak penghasilan yang lebih rendah, hal ini karena perusahaan tersebut memanfaatkan insentif pajak serta memanfaatkan ketentuan pajak lainnya untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Namun menurut Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh perusahaan maka akan menyebabkan semakin besarnya pajak penghasilan yang dikenakan. Berdasarkan inkonsistensinya hasil penelitian tersebut maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut.

Selain itu faktor *corporate governance* dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan manajemen pajak. Menurut Pranoto dan Widagdo (2015), melalui *corporate governance* yang berjalan dengan baik akan menghasilkan keputusan-keputusan yang efektif bagi para *stakeholders* termasuk dalam menentukan tarif pajak efektif. Sementara menurut Imelia (2015), komisaris independen mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam membayar pajak.

Faktor kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah juga dapat menjadi salah satu indikator dalam melakukan manajemen pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhikari et al.,(2006) di Malaysia menyatakan perusahaan yang memiliki koneksi politik membayar pajak yang ditanggung dan harus dibayarkan oleh perusahaan yang rendah. Namun hasil penelitian Chiou, Hsieh, dan Lin (2014) di China, menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Pranoto & Widagdo (2015) menyatakan bahwa koneksi politik sering dimanfaatkan untuk mengambil manfaat atas pajak dengan menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah dalam hal perpajakan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kepemilikan saham pemerintah terhadap manajemen pajak perusahaan, khususnya badan usaha milik negara, untuk mengetahui apakah manajemen pajak dilakukan oleh perusahaan badan usaha milik negara.

Dari beberapa uraian di atas, perusahaan melakukan langkah-langkah *tax planning* dengan dilihat dari investasi lebih banyak bergerak ke negara yang mempunyai tarif pajak yang rendah, serta *tax planning* yang dilakukan oleh Google dapat menghemat pengeluaran pajak sebesar 32,8%. Selain itu menurut beberapa penelitian terdahulu perusahaan sebenarnya dapat melakukan manajemen pajak untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan dalam membayar

pajak, tetapi tidak sampai melakukan pelanggaran pajak dengan menggunakan beberapa faktor yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Manajemen Pajak (Studi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI 2011-2015 )”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah *leverage* perusahaan dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah intensitas aset tetap dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah tingkat profitabilitas dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak?
5. Apakah saham pemerintah dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak?

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.
2. Mengetahui pengaruh *leverage* perusahaan terhadap manajemen pajak.
3. Mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak.
4. Mengetahui pengaruh tingkat profitabilitas terhadap manajemen pajak.



5. Mengetahui pengaruh saham pemerintah terhadap manajemen pajak.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu sebagai aplikasi dari teori yang telah didapat diperkuliahan, dan diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi literatur dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan manajemen pajak.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- 1) Bagi Peneliti: diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana pengembangan kemampuan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Selain itu dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis khususnya mengenai ukuran perusahaan, tingkat utang, intensitas aset, profitabilitas serta saham pemerintah dan kaitannya terhadap manajemen pajak pada BUMN. Serta untuk membandingkan antara teori-teori yang telah dipelajari, dengan prakteknya dilapangan.
- 2) Bagi perusahaan: dapat digunakan perusahaan dalam mengamati hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian, sehingga perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak perusahaan. Serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk memperbaiki dan meningkatkan manajemen pajak perusahaan.
- 3) Bagi Peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis : dapat digunakan sebagai bacaan awal untuk memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penelitian selanjutnya, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.
- 4) Bagi pihak lain: menjadi sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak.